

**IMPLEMENTASI PROGRAM KESETARAAN,  
KEAKSARAAN, KURSUS DAN PELATIHAN (K3P)  
PADA PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN  
SERANG**

Tesis

Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Pada Program Studi

Magister Administrasi Publik



Disusun oleh :

**Tamimi (777523005)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
TAHUN 2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

**Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus, dan Pelatihan  
(K3P) Pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten serang**

**Tesis ini telah dipertahankan di hadapan penguji**

Tanggal. ....30 Juni 2025.....  
Pembimbing I,



**Dr. Titi Stiawati., M.Si.  
NIP. 197011252005012001**

Tanggal. ....30 Juni 2025.....  
Pembimbing II,



**Prof. Dr. Suwaib Amiruddin., M.Si  
NIP. 197405012005011005**

Tanggal. ....1 Juli 2025.....  
Dekan Fakultas FISIP,



**Leo Agustino, PhD  
NIP. 197408032003121001**

Tanggal. ....30 - Juni 2025.....  
Ketua Program Studi,



**Dr. Titi Stiawati., M.Si.  
NIP. 197011252005012001**

**LEMBAR PERBAIKAN TESIS**

**Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus, dan Pelatihan  
(K3P) Pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten serang**

Telah diperbaiki sesuai dengan saran dan masukan tim dosen penguji

**Komisi Penguji**

- 1 Dr. Titi Stiawati., M.Si  
NIP. 197011252005012001
- 2 Prof. Dr. Suwaib Amiruddin., M.Si  
197405012005011005
- 3 Dr. Rina Yulianti., M.Si  
NIP. 197405012005011005
- 4 Dr. Ayuning Budiati., M.PPM  
NIP. 196905022005012001
- 5 Dr Ipah Ema Jumiyati., MSi  
NIP. 197501312005012004

**Sebagai**

**Tanda Tangan**

Ketua

Sekretaris

Penguji 1

Penguji 2

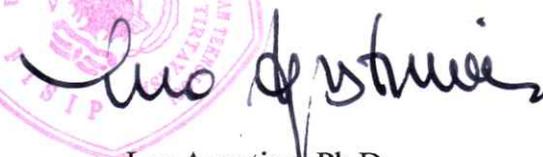
Penguji 3

Diketahui,

Tanggal, 21-7-2025  
Dekan,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tanggal, 21-7-2025  
Ketua Program Studi,  
Magister Administrasi Publik



  
Leo Agustino Ph.D  
NIP. 197408032003121001

  
Dr. Titi Stiawati, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197011252005012001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Tamimi  
NIM : 7775230005  
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PROGRAM KESETARAAN,  
KEAKSARAAN, KURSUS DAN PELATIHAN (K3P)  
PADA PENDIDIKAN KESETARAAN DI  
KABUPATEN SERANG

Menyatakan bahwa :

- (1) Tesis yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/doktor, baik di universitas sultan ageng tirtayasa maupun perguruan tinggi lainnya);
- (2) Tesis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing;
- (3) Dalam tesis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila pernyataan ini tidak sesuai, saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan norma yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan segala konsekuensinya.

Serang, 10-6-2025

Pembuat Pernyataan,



Tamimi

NIM. 7775230005

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang memberikan karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umat Islam sampai akhir zaman. Seiring berjalannya waktu, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul **“Implementasi Program dan Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Serang”**.

Maksud penyusunan Tesis ini adalah untuk dapat mengajukan penelitian Tesis guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (M.AP) pada Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam penyusunannya, penulis bersyukur karena memperoleh bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Leo Agustino, Ph.D., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Dr. Nurprapti Wahyu Widyastuti, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si, Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Ibu Ika Airinia A, S.IP., M.A., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Ibu Dr. Titi Stiawati, M.Si., Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus pembimbing I yang telah memberikan arahan, motivasi dan saran dalam proses penyusunan Tesis ini dan dalam bidang lainnya.
7. Bapak Prof. Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si, Pembimbing II yang telah memberikan saran selama proses penyusunan Tesis ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Magister Administrasi Publik.
9. Kedua Orang Tua atas kasih sayang, motivasi dan dukungannya kepada penulis selama ini.
10. Istri tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu demi satu atas motivasi dan sarannya kepada penulis selama ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2023 Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Penulis berharap saran dari semua pihak untuk dapat menyempurnakan Tesis ini.

Serang, November 2025

Tamimi  
NIM. 7775230005

## ABSTRAK

Tamimi, 2025. NIM 7775230005. Tesis Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) Pada Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten Serang . Program Studi Magister Administrasi Publik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I : Dr. Titi Stiawati.,M.Si Pembimbing II : Prof. Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si,

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus, dan Pelatihan (K3P) pada pendidikan kesetaraan di Kabupaten Serang. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas pelaksanaan program K3P dalam menjangkau kelompok masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal akibat keterbatasan ekonomi, sosial, dan geografis. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana, belum meratanya akreditasi PKBM, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan kesetaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi pada sejumlah PKBM. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang menekankan pada content of policy dan context of implementation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan struktural dan kultural, program K3P memberikan dampak positif dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan dan pengurangan angka putus sekolah. Untuk menjamin keberlanjutan, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan, penguatan kapasitas kelembagaan PKBM, serta kebijakan afirmatif terhadap pendidikan nonformal dan inklusif.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pendidikan Kesetaraan, PKBM, K3P, Kabupaten Serang

## ABSTRACT

*Tamimi, 2025. NIM 7775230005. Thesis Implementation of Equivalency, Literacy, Course and Training Program (K3P) in Equivalency Education in Serang Regency. Master of Public Administration Study Program. Sultan Ageng Tirtayasa University. Supervisor I: Dr. Titi Stiawati., M.Si Supervisor II: Prof. Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si,*

*This study aims to analyze the implementation of the Equivalency, Literacy, Course, and Training Program (K3P) in equivalency education in Serang Regency. The focus of the research is directed at the effectiveness of the implementation of the K3P program in reaching community groups who have not completed formal education due to economic, social, and geographical limitations. The main problems identified are the low quality of facilities and infrastructure, the uneven accreditation of PKBM, and the low public awareness of the importance of equivalency education. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies at a number of PKBM. The analysis was conducted using Merilee S. Grindle's policy implementation theory which emphasizes the content of policy and the context of implementation. The results of the study indicate that despite structural and cultural challenges, the K3P program has a positive impact on increasing educational participation rates and reducing dropout rates. To ensure sustainability, synergy between stakeholders, strengthening the institutional capacity of PKBM, and affirmative policies towards non-formal and inclusive education are needed.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Equality Education, PKBM, K3P, Serang Regency*

## DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN TESIS.....	II
LEMBAR KEASLIAN .....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
ABSTRAK .....	VI
ABSTRACT .....	VII
DAFTAR ISI .....	VIII
DAFTAR TABEL .....	IX
DAFTAR GAMBAR .....	X
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	28
1.3 Rumusan Masalah .....	29
1.4 Tujuan Penelitian.....	29
1.5 Manfaat Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI .....	31
2.1 Tinjauan Teoritik .....	31
2.2 Penelitian Terdahulu .....	63
2.3 Kerangka Pemikiran .....	73
BAB III METODE PENELITIAN .....	76
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian .....	76
3.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	78
3.4 Definisi Konsep dan Definisi Operasional .....	79
3.5 Instrumen Penelitian.....	85
3.6 Informan Penelitian .....	86
3.7 Teknik Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data .....	88
3.8 Uji Keabsahan Data.....	96
3.9 Jadwal Penelitian.....	96
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....	98
4.1. Gambaran Umum kabupaten Serang.....	98
4.1. Analisis Data Penelitian.....	98
4.2. Pembahasan Hasil dan Temuan Penelitian .....	114
4.3. Keterbatasan Penelitian .....	151
BAB V PENUTUP .....	154
5.1. Simpulan .....	154
5.2. Saran .....	156
5.3. Rekomendasi.....	157
DAFTAR PUSTAKA.....	159
LAMPIRAN .....	162

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 1.1 Angka Anak Tidak Sekolah .....	6
Tabel 1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) .....	11
Tabel 2.1 Model Implementasi.....	54
Tabel 3.1 Operasionalisasi Model Implementasi .....	78
Tabel 3.2 Informan Penelitian .....	84
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	94
Tabel 4.1 Kecamatan, luas Wilayah dan Jumlah Desa .....	98
Tabel 4.2 Jumlah Minat Masyarakat Yang Mendaftar PKBM.....	103

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1. Model Pendekatan The Policy Implementasi Proses.....	43
Gambar 2.2. Model Pendekatan Direct and Indirect Impact.....	48
Gambar 2.3. Model Pendekatan Implementation as A Political.....	53
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran.....	70
Gambar 3.1 Langkah – Langkah Analisis Data Interaktif.....	89
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Serang.....	98

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan pilar utama pembangunan sumber daya manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam konteks pemerataan akses pendidikan, pemerintah mengembangkan tiga jalur pendidikan: formal, nonformal, dan informal. Pendidikan nonformal, khususnya melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), menjadi solusi strategis bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal karena keterbatasan ekonomi, geografis, atau sosial.

Secara nasional, Permendikbud No. 81 Tahun 2013 menetapkan standar minimal prasarana PKBM, seperti ruang belajar (40 m<sup>2</sup>), ruang praktik (20 m<sup>2</sup>), dan Taman Bacaan Masyarakat (20 m<sup>2</sup>), untuk menjamin kualitas pembelajaran. Namun, implementasi standar ini di tingkat daerah masih menghadapi tantangan berat. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Serang (2024) menunjukkan bahwa dari 84 PKBM, 36 lembaga (42,8%) berakreditasi C dan 16 lainnya belum terakreditasi. Kondisi ini mengindikasikan ketidaksesuaian dengan standar teknis yang berlaku.

Rendahnya kualitas prasarana PKBM berdampak langsung pada proses pembelajaran. Survei lapangan di 10 PKBM akreditasi C mengungkap bahwa 70% lembaga menggunakan ruang multifungsi yang sempit, tanpa peralatan

praktik memadai, sehingga menghambat pencapaian kompetensi peserta didik. Padahal, Permendikbud No. 32 Tahun 2019 menekankan bahwa PKBM harus menyediakan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung kurikulum kesetaraan (Paket A, B, C) dan program keaksaraan.

Faktor penyebab ketidakpatuhan terhadap standar meliputi:

1. Keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan/prasarana PKBM.
2. Minimnya pengawasan dari dinas pendidikan terkait pemenuhan standar.
3. Rendahnya kesadaran pengelola PKBM tentang pentingnya akreditasi.

Dampak sosialnya pun serius. Peserta didik PKBM—yang umumnya berasal dari keluarga kurang mampu—berisiko mengalami kesenjangan kompetensi dibanding lulusan sekolah formal. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa angka putus sekolah di jenjang SMA/ sederajat di Kabupaten Serang mencapai 21,61%, dengan sebagian besar beralih ke PKBM. Tanpa prasarana memadai, program kesetaraan justru berpotensi memperpanjang rantai ketidakadilan pendidikan.

Pendidikan di Indonesia sendiri merupakan pendidikan yang berjenjang dari yang terendah dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, serta Perguruan Tinggi yang dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka memperoleh pengetahuan, kecakapan, serta kreatifitas atau inovasi. Ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan hingga kepada jenjang yang lebih tinggi mengakibatkan rendahnya pengetahuan, kecakapan dan kreatifitas mereka dalam mengakses

lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan permasalahan pengangguran yang belum juga bisa terselesaikan.

Pendidikan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 13 ayat 1 telah menjelaskan juga bahwasannya jalur pendidikan di Indonesia itu meliputi tiga jalur, yaitu pendidikan formal, informal, dan nonformal.

Pendidikan non formal adalah salah satu jalur pendidikan di luar dari pendidikan formal akan dilakukan secara terstruktur, terprogram, terencana, fleksibel dan berkelanjutan. Pendidikan non formal ini dirancang sebagai layanan pengganti, penambah atau pelengkap yang terdapat dalam pendidikan jalur formal dalam rangka untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan seumur hidup (*long life education*) merupakan konsep penting dalam program kesetaraan ini, dimana program ini tidak boleh berhenti setelah seseorang menyelesaikan sekolahnya. Program pendidikan seumur hidup ini harus mendukung orang-orang terus belajar dan mengembangkan keterampilan sepanjang hidup mereka.

Program keaksaraan merupakan salah satu program yang di Pendidikan Non-formal yaitu dimana program tersebut bertujuan untuk mencapai kesetaraan dalam berbagai aspek termasuk aspek pendidikan, pekerjaan dan akses ke layanan dalam masyarakat. Dimana di dalam program kesetaraan ini memiliki sasaran yang lebih utama yaitu dari anak sekolah hingga dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan di jalur formal yang di sebabkan oleh beberapa hal seperti ekonomi, sosial, hukum dan lain-lainnya yang menjadi faktor penghambat dalam seseorang mencapai pendidikan formalnya.

Faktor-faktor yang membuat tidak terselesaikannya pendidikan dasar sembilan tahun yaitu tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota sehingga tidak bisa bersekolah, tidak bersekolah yang disebabkan oleh faktor finansial, bekerja mencari nafkah, bertempat tinggal di komunitas yang memiliki pemikiran bahwasannya pendidikan itu tidak penting, atau tinggal di daerah yang sedang mengalami bencana atau di daerah yang sedang berkonflik. Dalam hal mendukung program pemerintah tentang menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat yang kurang beruntung dalam hal pendidikan, diperlukan upaya khusus melalui penyelenggaraan program pendidikan nonformal setara paket A, B dan C yang berfungsi menggantikan substitusi atau penambahan.

Implementasi dalam program kesetaraan pendidikan lebih melibatkan upaya dalam mengatasi ketidaksetaraan yang ada pada masyarakat. Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu dari bagian Pendidikan Non-formal dimana di dalam program tersebut menyediakan layanan pendidikan, program paket A yang setara dengan sekolah dasar (SD), program paket B setara dengan sekolah menengah pertama (SMP) dan program paket C setara dengan sekolah menengah atas (SMA), dengan lebih menekankan pada aspek keilmuan dan keterampilan. Hal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwasannya semua generasi dapat memiliki akses yang setara dalam hal mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan di zaman yang akan datang nantinya.

Keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah juga merupakan komponen penting dalam pengimplementasian program kesetaraan ini. Dukungan dari keluarga, sekolah dan komunitas dapat memberikan dorongan yang di perlukan

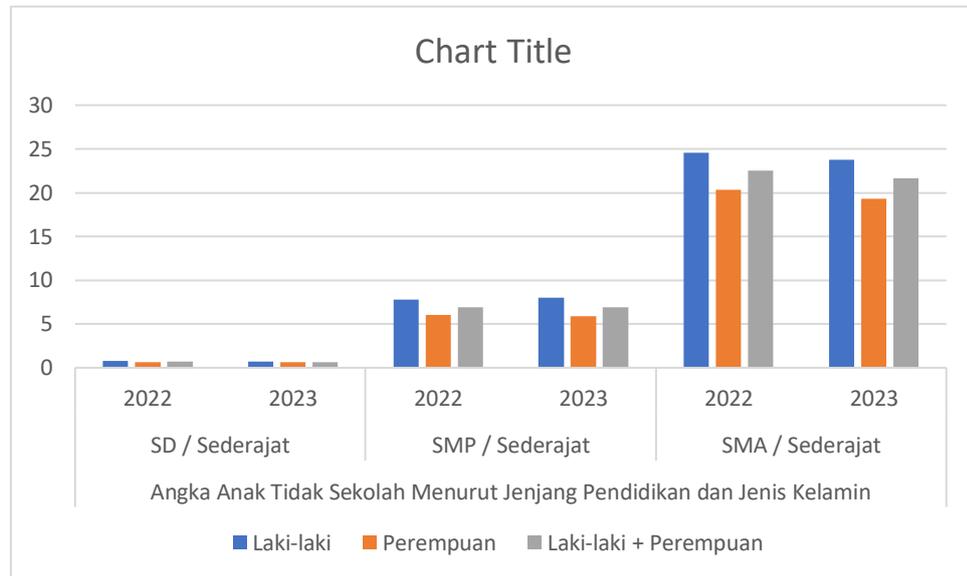
bagi generasi muda untuk meraih pendidikan yang mereka ingin capai. Dengan upaya dari segala pihak ini dapat menciptakan Masyarakat yang mendapatkan kesempatan yang sama pada setiap generasi untuk tumbuh dan berkontribusi positif di lingkungan sekitarnya.

Pelaksanaan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata dalam menyiapkan segala perangkat aturan sarana dan prasarana akan tetapi disisi lain juga memerlukan kesadaran maupun keseriusan masyarakat karena semua *stakeholders* harus sinergi sebagai salah satu pemicu dalam mengupayakan pelaksanaan pendidikan yang efektif. Seluruh elemen-elemen yang ada dimulai pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sampai pada unit-unit teknis harus menjalin koordinasi yang baik agar proses pendidikan terlaksana dengan baik.

Langkah taktis yang diambil pemerintah di dalam bidang Pendidikan yaitu adanya program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang berarti seluruh anak di Indonesia diwajibkan mengenyam pendidikan dasar sampai menengah. Diharapkan dengan adanya program ini mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah agar tidak ada lagi anak-anak yang harus putus sekolah.

Dengan adanya kebijakan tersebut tidak serta merta menjadikan anak usia sekolah mengakses pendidikan di sekolah, hal tersebut dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2023:

**Tabel 1.1**  
**Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2022-2023**



*Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2023*

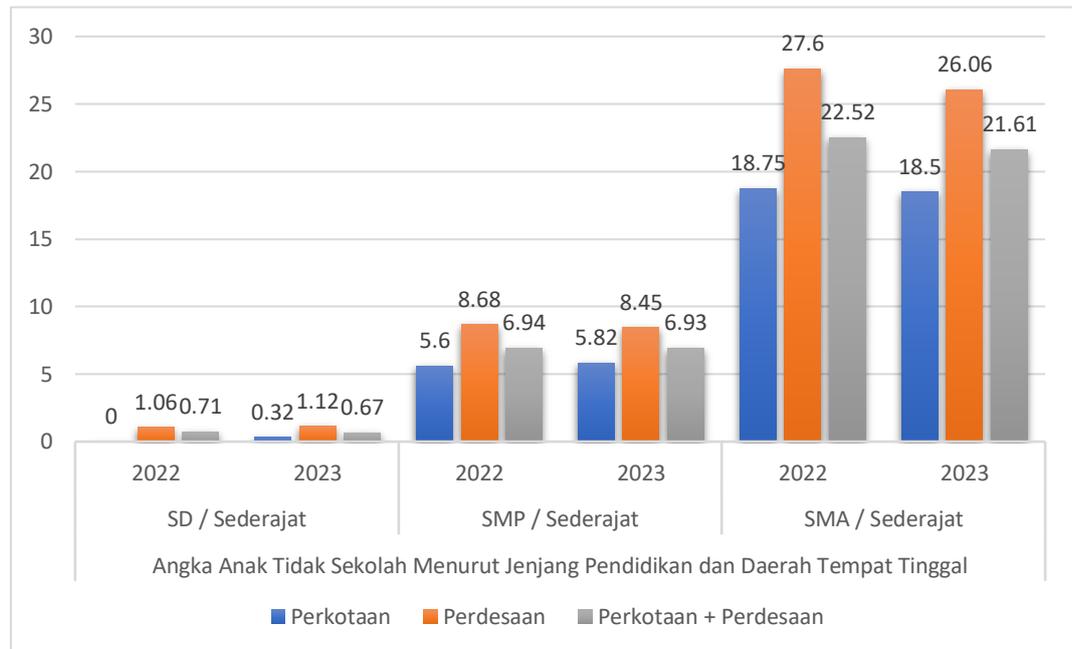
Berdasarkan tabel 1.1 di atas diketahui angka anak Indonesia yang tidak bersekolah menurut jenjang pendidikan, berdasarkan jenjang pendidikan sekolah dasar/ sederajat diketahui bahwa yang tidak bersekolah pada tahun 2022 sebesar 0,71 persen anak usia sekolah dasar yang tidak sekolah, sementara di tahun 2023 angka usia sekolah jenjang SD yang tidak sekolah sebesar 0,67 Persen. Kemudian jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama usia sekolah yang tidak sekolah di SMP/ sederajat pada tahun 2022 sebanyak 6,94 persen dan di tahun 2023 sebanyak 6,93, Selanjutnya pada jenjang pendidikan usia sekolah SMA/ sederajat yang tidak sekolah pada tahun 2022 sebanyak 22,52 persen dan di tahun 2023 sebanyak 21,61 persen.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa di Indonesia usia sekolah yang tidak sekolah dari jenjang pendidikan SD/ Sederajat sampai dengan

jenjang pendidikan SMA/Sederajat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ini artinya usia sekolah yang tidak sekolah semakin meningkat seiring jenjang pendidikan meningkat. Ini adalah masalah yang tentunya harus diupayakan salah satunya dengan mendorong untuk menempuh pada sekolah non-formal yang dibentuk oleh masyarakat dan diatur dalam pelaksanaannya oleh pemerintah dalam rangka menyetarakan jenjang pendidikan anak-anak yang tidak bersekolah atau bahkan putus sekolah.

Motivasi untuk mengenyam pendidikan di pengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya salah satunya faktor daerah tempat tinggal, dimana suatau daerah memiliki kondisi yang berbeda seperti ada atau tidaknya sekolah, jarak tempuh sekolah, sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut serta kompetensi tenaga pendidik di suatu daerah. Hal ini tentu akan mempengaruhi minat anak untuk mengenyam pendidikan melalui sekolah. Berdasarkan hal tersebut berikut ditampilkan data angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal pada tahun 2022-2023, sebagai berikut:

**Diagram 1.2**  
**Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal, 2022-2023**



*Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2023*

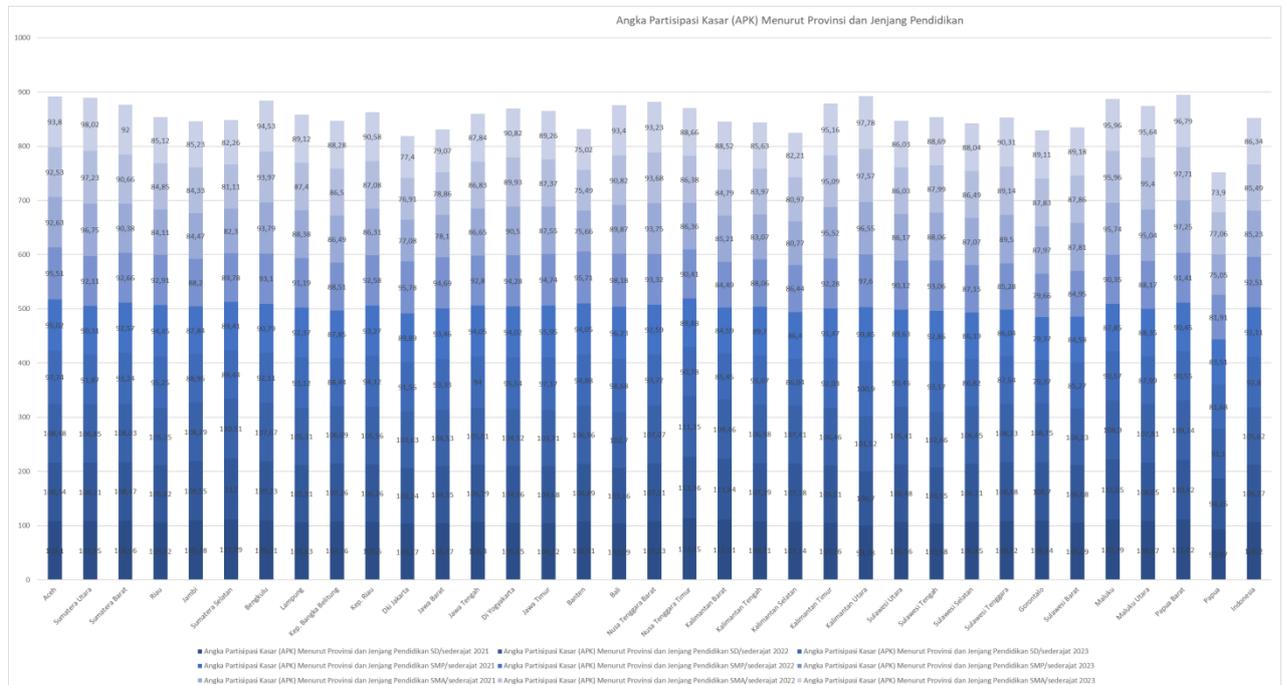
Berdasarkan Diagram 1.2 di atas menunjukkan data angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal diketahui bahwa pada pada jenjang Pendidikan SD/Sederajat wilayah perkotaan pada tahun 2022 sebanyak 0,45 dan tahun 2023 0,32, sementara itu data angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal diketahui bahwa pada pada jenjang Pendidikan SD/Sederajat wilayah perdesaan pada tahun 2022 1,06 dan tahun 2023 1,12, kemudian pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat wilayah perkotaan pada tahun 2022 sebanyak 5,6 dan tahun 2023 5,82, sementara itu data angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal diketahui bahwa pada pada jenjang Pendidikan SMP/Sederajat wilayah perdesaan pada tahun

2022 8,68 dan tahun 2023 8,45. Berdasarkan tabel di atas juga diketahui bahwasanya angka anak yang tidak sekolah di berbagai jenjang Pendidikan untuk di wilayah perkotaan relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan wilayah perdesaan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator penting dalam mengukur tingkat partisipasi pendidikan di suatu negara atau daerah. APK mengacu pada persentase populasi usia sekolah yang terdaftar dalam tingkat pendidikan tertentu. Faktor-faktor seperti ketersediaan fasilitas pendidikan, kemiskinan, budaya, dan kualitas pendidikan dapat mempengaruhi APK.

APK yang tinggi memiliki manfaat dalam meningkatkan akses pendidikan, kesetaraan, dan kualitas hidup individu. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan meningkatkan APK guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas. Berikut ini adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2021-2023, sebagai berikut:

**Diagram 1.3**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan,**  
**2021-2023**



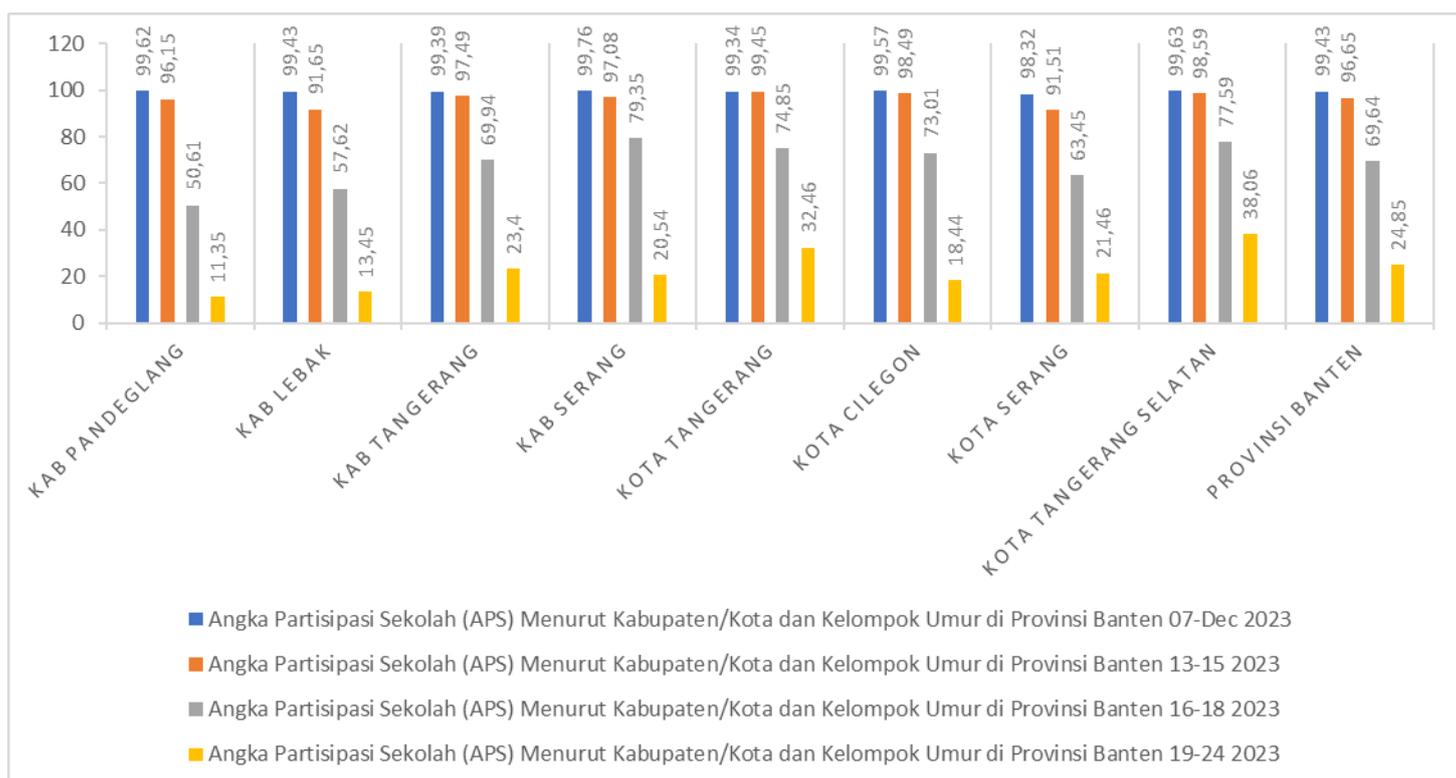
*Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2023*

Berdasarkan Diagram 1.3 di atas diketahui angka Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Provinsi sesuai dengan jenjang pendidikan menunjukkan bahwa APK untuk Provinsi Banten pada jenjang pendidikan SD/Sederajat menunjukkan pada tahun 2021 sebesar 106,91%, tahun 2022 106,89%, dan tahun 2023 106,96%. Melihat data tersebut menunjukkan pada jenjang pendidikan SD/Sederajat pada usia sekolah atau memenuhi syarat resmi usia sekolah capaiannya baik, namun berbeda dengan APK untuk Provinsi Banten pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat yang menunjukkan penurunan yakni pada tahun 2021 sebesar 94,88%, tahun 2022 sebesar 94,05%, dan tahun 2023 sebesar 95,71%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup jelas berkaitan partisipasi kasar penduduk usia sekolah, pada

jenjang pendidikan SMP/Sederajat ini tidak tercapai seratus persen penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan tingkat SMP/Sederajat.

APS merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Dengan makin tingginya APS, Anindito menyebut hal itu menjadi hal yang positif karena menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mengutamakan aspek pendidikan. Tingginya APS juga menandakan bahwa pemerintah telah berhasil menyediakan akses pendidikan sehingga masyarakat mudah menyekolahkan anak-anak mereka. Berikut adalah data Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Banten tahun 2023:

**Tabel 1.2**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Banten, 2023**



*Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2023*

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa APS Provinsi Banten berdasarkan kelompok umur 7-12 tahun yaitu 99,43%, kelompok umur 13-15 tahun 96,65%, kelompok umur 16-18 tahun 69,64%, dan kelompok umur 19-24 tahun 24,85 %. Semakin tinggi kelompok umur semakin rendah Tingkat partisipasi sekolah di Provinsi Banten. Hal ini tidak berbeda dengan kondisi yang dialami Kabupaten Serang dimana angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu 99,76%, kelompok umur 13-15 tahun 97,08%, kelompok umur 16-18 tahun 79,35%, dan kelompok umur 19-24 tahun 20,54 %. Hal ini juga menunjukkan semakin tinggi kelompok umur semakin rendah Tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Serang.

Partisipasi sekolah adalah salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan di bidang pendidikan. Harapannya semakin tinggi tingkat partisipasi dari penduduk pada semua jenjang pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat menjadi lebih baik. Informasi mengenai partisipasi sekolah dapat membantu pemerintah dalam mengintervensi program pendidikan supaya lebih tepat sasaran. Partisipasi sekolah juga merupakan bentuk monitoring keberhasilan pendidikan yang dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

Angka partisipasi sekolah yang semakin menurun pada Tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan penduduk usia sekolah diketahui banyak faktor yang melatarbelakangi putus sekolah, secara umum yaitu sebagai berikut:

## 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling menonjol akan terjadi putus sekolah di Indonesia. Karena pada saat ini semua hal pasti membutuhkan ekonomi yang baik dan pembiayaan, apa lagi pada proses pendidikan. Meskipun terdapat sekolah yang memberikan beasiswa, maupun lainnya. Orang tua yang mempunyai pendapat rendah cenderung tidak memperbolehkan anaknya untuk melanjutkan pendidikannya. Karena di rasa tidak ada biaya lagi untuk melanjutkan sekolah akhirnya anak tersebut terpaksa untuk diberhentikan sekolah sebelum waktunya. Pada tahun 2022 lalu merupakan tahun yang cukup rumit karena banyak orang tua yang masih merintisnya usaha dan lainnya karena masa transisi setelah terjadi pandemi Covid di tahun 2020 dan 2021 lalu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada dasar status ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya putus sekolah pada siswa, dimana siswa yang keluarga memiliki kondisi ekonomi rendah cenderung lebih tinggi untuk putus sekolah dibandingkan keluarga yang ekonomi menengah bahwa menengah atas (Ziana et al., 2017).

## 2. Faktor Pendidikan

Selain adanya faktor ekonomi, faktor pendidikan juga menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya siswa putus sekolah. Karena pendidikan sendiri merupakan hal dicari oleh siswa tersebut, sehingga dalam pendidikan jika terjadi sebuah masalah maupun hal-hal yang mengakibatkan siswa tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Seperti terjadinya permasalahan terkait kebijakan di suatu sekolah, jika sekolah tersebut

memiliki kebijakan yang rumit dan juga sulit dipahami maka dapat mengakibatkan siswa enggan untuk melanjutkan sekolah. Selain itu, permasalahan terkait kuantitas dan kualitas pendidikan di sekolah juga dapat mengakibatkan siswa memiliki untuk tidak melanjutkan sekolah, seperti halnya sekolah tersebut kurang bermutu dan berkualitas sehingga siswa cenderung kurang mendapat hal-hal yang seharusnya didapatkan melalui sekolah. Terkadang dalam proses pendidikan di sekolah pun masih terdapat hal-hal yang kurang menyenangkan seperti terjadi bullying, kekerasan hukuman guru dan lainnya sehingga mengakibatkan siswa dapat memutuskan sekolah (Septianto, 2021).

### 3. Faktor Sosial dan Budaya

Sosial budaya adalah keseluruhan dari beberapa unsur yaitu tata nilai, tata sosial dan tata laku yang saling terikat satu sama lainnya. Bahwa kebiasaan, pandangan hidup serta tradisi yang turun temurun adalah bagian dari lingkungan sosial budaya. Pada dasarnya masyarakat Indonesia sebagian besar masih beranggapan bahwa pendidikan formal itu kurang penting. Pendidikan dirasa sudah cukup ketika anak-anak telah dapat membaca dan menulis. Bekerja sebagai petani yang merupakan pekerjaan turun temurun menurut mereka tidak memerlukan pendidikan tinggi (Zainuri et al., 2020). Oleh karena itu sejak dini anak-anak di desa tersebut sudah diajarkan bagaimana bekerja dan mencari nafkah. Pandangan banyak anak banyak rezeki juga masih dianut oleh sebagian masyarakat yang ada di desa tersebut. Bagi mereka anak merupakan asset atau sumber tenaga kerja yang dapat

membantu orang tua bekerja. Selain itu masih adanya anggapan anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena kodrat anak perempuan nantinya akan bekerja di dapur dan mengurus rumah dan anak. Angka tersebut akan semakin tinggi seiring dengan semakin tinggi jenjang Pendidikan yang ditempuh. Jika jumlah tersebut terus dipertahankan, maka timbullah berbagai permasalahan baru seperti meningkatnya pengangguran, kriminalitas, kemiskinan dan kenakalan remaja (Tamba et al., 2014). Dengan adanya putus sekolah, menurut Combs (1973) dapat mengakibatkan siswa-siswa mengalami hal-hal berikut. (a) Munculnya rasa kecewa dan patah semangat karena terpaksa untuk putus sekolah karena ekonomi sedang mereka masih berkeinginan untuk sekolah. (b) Timbulnya penurunan nilai moral karena adanya jiwa yang merasa kosong sehingga mengakibatkan niat untuk berkegiatan melakukan hal-hal negatif. (c) Dapat menimbulkan angka buta huruf yang dapat meningkatkan karena terlalu sehingga mereka untuk berinteraksi dengan orang dewasa dalam mencari nafkah atau bahkan berumah tangga. (d) Masih kurang mampu untuk dapat mencapai kedewasaan yang maksimal sehingga kurang siap untuk berkeluarga, kurang mandiri maupun terbatasnya pergaulan dengan teman sebaya. (e) Masyarakat dan pemerintah akan dirugikan karena aset pembangunan negara yaitu calon generasi mudanya udah diputuskan sekolah, sehingga dapat merosotnya pembangunan negara. Berdasarkan data yang diperoleh menyatakan bahwa penyebab tingginya angka putus sekolah ini disebabkan oleh banyak faktor lainnya, diantaranya kurangnya minat anak untuk

sekolah, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor komunikasi internal keluarga, faktor sosial hingga faktor kesehatan (Sarfa, 2016).

#### 4. Faktor Kurang Minat Anak untuk Sekolah

Salah satu faktor yang menyebabkan angka putus sekolah meningkat adalah kurangnya minat anak untuk bersekolah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya motivasi, ketidakcocokan dengan metode pembelajaran, atau kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan.

#### 5. Faktor Lingkungan

Lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi sekolah. Faktor-faktor seperti infrastruktur pendidikan yang buruk, jarak tempuh yang jauh ke sekolah, atau kekurangan fasilitas pendukung seperti transportasi yang memadai dapat menjadi hambatan bagi anak-anak untuk bersekolah.

#### 6. Faktor Komunikasi Internal Keluarga

Komunikasi yang kurang efektif antara anggota keluarga dapat berdampak pada partisipasi anak dalam pendidikan. Kurangnya dukungan dan pemahaman dari orang tua atau keluarga terhadap pentingnya pendidikan dapat mempengaruhi keputusan anak untuk putus sekolah. Faktor Sosial: Norma sosial, tekanan sosial, atau stereotipe gender juga dapat memainkan peran dalam meningkatnya angka putus sekolah. Faktor-faktor ini dapat menciptakan hambatan dan ekspektasi yang tidak menguntungkan bagi anak-anak dalam mengejar pendidikan mereka.

## 7. Faktor Kesehatan

Masalah kesehatan fisik atau mental juga dapat menjadi penyebab angka putus sekolah yang tinggi. Ketidakmampuan anak untuk hadir secara teratur di sekolah akibat penyakit atau masalah kesehatan dapat menyebabkan mereka tertinggal dalam pembelajaran dan akhirnya memutuskan untuk putus sekolah.

Dengan adanya beberapa faktor tersebut diperlukan untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, bahwa angka putus sekolah di Indonesia tentunya dapat mengakibatkan berbagai hal yang dapat menurunkan tingkat pembangunan negara jika angka putus sekolah di tahun mendatang terus mengalami peningkatan. Pemerintah diharuskan untuk dapat memberikan perhatian khusus terkait adanya peningkatan angka putus sekolah di Indonesia.

Berdasarkan data-data di atas kehadiran program kesetaraan merupakan alternatif kebijakan pendidikan untuk memperoleh standar pendidikan yang sama dengan mendapatkan pengakuan yang sama oleh pemerintah melalui program pendidikan non-formal, hal ini tentu relevan dengan apa yang terjadi dan sudah menjadi isu pendidikan di Kabupaten Serang maupun isu pendidikan di Tingkat nasional.

Pendidikan kesetaraan adalah sebuah sistem pendidikan yang dirancang untuk memberikan peluang pendidikan kepada individu yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Program ini sering ditujukan untuk mereka yang telah keluar dari sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah. Tujuan utama dari pendidikan kesetaraan adalah untuk memberikan

pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan memungkinkan mereka berpartisipasi dalam masyarakat.

Program pendidikan kesetaraan biasanya mencakup kursus-kursus yang setara dengan kurikulum sekolah dasar dan menengah. Ini termasuk pelajaran dalam mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa, dan studi sosial. Sistem ini memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan jadwal mereka sendiri, sehingga mereka dapat bekerja sambil belajar. Pendidikan kesetaraan memiliki dampak positif, seperti membantu individu meningkatkan peluang pekerjaan, kemandirian, dan kualitas hidup mereka. Ini juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan pendidikan di masyarakat. Namun, masih ada tantangan dalam hal akses dan kualitas program pendidikan kesetaraan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan dan meningkatkan sistem ini agar dapat mencapai sasaran pendidikan kesetaraan dengan lebih baik.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 diketahui bahwa pendidikan dibagi menjadi tiga macam, yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal:

#### 1) Pendidikan Formal

Pendidikan Formal adalah pendidikan yang mengacu pada program yang terencana, terstruktur, dan berjenjang mulai dari tingkat pendidikan paud, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di Indonesia, pendidikan ini dimulai dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di Indonesia, pendidikan ini dimulai dari

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi.

## 2) Pendidikan Non-Formal

Berdasarkan Bab Kelima Undang-Undang No.20/2003 pasal 26 dinyatakan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

## 3) Pendidikan Informal

Pendidikan Informal adalah pendidikan yang terjadi di dalam keluarga dan lingkungan. Ini adalah pendidikan tingkat pertama yang sangat mendasar yang dialami oleh semua orang. Dimana dalam pendidikan informal ini karakter anak akan terbentuk. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi baik buruknya sikap anak. Oleh karena itu, pendidikan informal seharusnya menjadi pendidikan yang sangat diperhatikan oleh orang tua.

Pendidikan kesetaraan merupakan Sarana yang pemerintah sediakan dalam sistem pendidikan nasional, yang bertujuan menyetarakan standar pendidikan yang ada pada jalur pendidikan nonformal dengan pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan terdiri dari paket A, paket B, paket C dan pendidikan lainnya yang ditujukan guna pembinaan kemampuan peserta didik. Pendidikan kesetaraan yaitu pendidikan nonformal bagi warga negara Indonesia usia sekolah yang fungsinya menekankan pada pengembangan pengetahuan akademik dan keterampilan praktis, sikap dan kepribadian profesional, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, mengembangkan potensi peserta didik. Sebagian masyarakat yang belum selesai pendidikan dasar ditempuh melalui pendidikan non formal.

Tujuan pendidikan nonformal yakni masyarakat yang putus sekolah bisa terbantu untuk mendapatkan kesempatan pendidikan. Salah satu program pendidikan nonformal yaitu pendidikan kesetaraan yang di selenggarakan untuk masyarakat untuk menyetarakan pendidikan paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan paket A setara dengan sekolah dasar (SD).

Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan sebagai sistem pendidikan nonformal dalam Pendidikan nonformal. Tujuan pemerataan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Melalui program pendidikan nonformal Kejar Paket A dan Paket B, pendidikan dasar 9 tahun aksesnya semakin luas.

- b) Program pendidikan nonformal Paket C Kejar dapat memperluas akses Pendidikan menengah.
- c) Meningkatkan kualitas pemerataan dan relevansi pendidikan paket A, paket B dan paket C rencana pengejaran.
- d) Meningkatkan akuntabilitas serta tata kelola citra publik terhadap organisasi dan kesetaraan lulusan pendidikan.

Pendidikan kesetaraan dengan program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi warga belajar sehingga bisa memiliki suatu keahlian atau kemampuan serta berkarakter baik yang berpengaruh dalam kehidupan masa depan yang lebih baik. Pendidikan kesetaraan memiliki tujuan yang baik untuk masa depan siswa agar mendapatkan perlakuan yang sama dalam dunia kerja, namun dalam menjalankan program pendidikan kesetaraan melalui penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pemerintah Kabupaten Serang mengalami berbagai persoalan diantaranya:

- a) Pertama kondisi prasarana dan sarana PKBM saat ini belum sepenuhnya memadai, baik secara jumlah maupun kualitas. Hal ini bertentangan dengan standar yang telah diatur dalam petunjuk teknis, sehingga diperlukan upaya perbaikan. Adapun datanya sebagai berikut:

#### 1. Gedung/Ruang Belajar

Kondisi Umum: Banyak PKBM yang masih menempati bangunan yang kurang layak/memadai. Persentase Kekurangan :

- a) Tidak Memiliki Gedung Tetap/Layak: 25%
- b) Gedung Tidak Memenuhi Standar Minimal (Kerusakan, Ukuran, Ventilasi, Pencahayaan): 15%
- c) Total Kekurangan (Gedung/Ruang Belajar): 40%

## 2. Perabot (Meja, Kursi, Lemari Arsip)

Kondisi Umum: Ketersediaan perabot seringkali tidak mencukupi jumlah peserta didik atau dalam kondisi rusak/tidak layak pakai. Persentase Kekurangan:

- a) Jumlah Kurang/Tidak Memadai: 20%
- b) Kondisi Rusak/Tidak Layak: 15%
- c) Total Kekurangan (Perabot): 35%

## 3. Alat Peraga dan Media Pembelajaran

Kondisi Umum: Keterbatasan alat peraga, poster, peta, model, atau media pembelajaran interaktif yang relevan dengan materi pelajaran. Persentase Kekurangan:

- a) Ketersediaan Minimal: 30%
- b) Tidak Ada/Sangat Minim: 20%
- c) Total Kekurangan (Alat Peraga): 50%

## 4. Perpustakaan/Sudut Baca & Koleksi Buku

Kondisi Umum: Banyak PKBM yang tidak memiliki perpustakaan atau sudut baca, serta koleksi buku yang sangat terbatas dan kurang update.

Persentase Kekurangan:

- a) Tidak Ada Perpustakaan/Sudut Baca: 35%
- b) Koleksi Buku Sangat Minim/Tidak Relevan: 25%
- c) Total Kekurangan (Perpustakaan/Buku): 60%

#### 5. Perangkat Teknologi Informasi (Komputer, Proyektor, Akses Internet)

Kondisi Umum: Akses terhadap teknologi informasi masih sangat terbatas, terutama di daerah pedesaan, menghambat pembelajaran berbasis digital. Persentase Kekurangan:

- a) Tidak Ada Komputer/Jumlah Terbatas: 30%
- b) Tidak Ada Proyektor/Alat Bantu Visual Lain: 20%
- c) Tidak Ada/Akses Internet Buruk: 40%
- d) Total Kekurangan (Perangkat TI): 90% (Ini sering menjadi kekurangan terbesar)

#### 6. Sanitasi dan Kebersihan (Toilet, Air Bersih)

Kondisi Umum: Ketersediaan toilet yang bersih dan layak, serta akses air bersih yang memadai, masih menjadi tantangan di beberapa PKBM. Persentase Kekurangan:

- a) Toilet Tidak Memadai/Rusak: 10%

- b) Akses Air Bersih Terbatas: 5%
- c) Total Kekurangan (Sanitasi): 15%

7. Area Praktek/Workshop (Khusus PKBM dengan Program Keterampilan)

Kondisi Umum: Bagi PKBM yang menyelenggarakan program keterampilan, ketersediaan area praktek dan peralatan yang memadai sangat krusial. Persentase Kekurangan:

- a) Tidak Ada Area Praktek Khusus: 30%
- b) Peralatan Praktek Tidak Lengkap/Rusak: 25%
- c) Total Kekurangan (Area Praktek/Workshop): 55%

Berdasarkan kategori di atas, jika dirata-ratakan secara kasar, kekurangan sarana dan prasarana PKBM secara keseluruhan dapat mendekati sekitar 40% - 50%, dengan beberapa aspek (seperti teknologi informasi dan koleksi buku) mengalami kekurangan yang jauh lebih signifikan.

- b) Masih banyaknya jumlah PKBM yang belum terakreditasi dan terakreditasi C pada tahun 2024, akreditasi merupakan penilaian terhadap pengelolaan PKBM untuk mencapai target target yang ada dengan melakukan pemenuhan terhadap segala persyaratan sebagai PKBM yang unggul. Sebagaimana diketahui bahwa ada 84 PKBM yang ada di Kabupaten Serang berdasarkan data PKBM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Serang tahun 2024 diketahui dari 84 PKBM terdapat 16 PKBM yang belum terakreditasi, sementara yang mendapatkan akreditasi C sebanyak 36 PKBM, Data akreditasi PKBM di Kabupaten Serang: dari 84 PKBM, 36 (42,8%) berakreditasi C dan 16 belum terakreditasi. Survei lapangan: 70% PKBM akreditasi C menggunakan ruang multifungsi yang sempit dan minim peralatan praktik Hal ini tentunya mengganggu penyelenggaraan program Pendidikan kesetaraan yang ada di Kabupaten Serang.

**Tabel 1.3**  
**Data Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA LEMBAGA	NPSN	STATUS AKREDITASI
1	ANYAR	PKBM BINA SEJAHTERA	P9926352	Belum
2	ANYAR	PKBM KARYA MANDIRI SERANG	P9970413	B
3	BANDUNG	PKBM AL KAHFI	P9996704	B
4	BANDUNG	PKBM BANDUNG LESTARI	P9952778	C
5	BAROS	PKBM WIYATA BHAKTI	P9908894	C
6	BAROS	PKBM LINTAS SABIT	P9997202	C
7	BAROS	PKBM ASSIDIQIAH	P9948586	C
8	BAROS	PKBM AL UMMAH	P9998579	Belum
9	BINUANG	PKBM IBU PERTIWI	P9998066	C
10	BINUANG	PKBM BUNGA BANGSA	P9908883	B
11	CARENANG	PKBM NURUL HUDA	P9908884	C
12	CIKANDE	PKBM INSAN MADANI	P9948112	C
13	CIKEUSAL	UPT SKB KABUPATEN SERANG	P9970198	A
14	CIKEUSAL	PKBM ANUGRAH	P9956981	C
15	CIKEUSAL	PKBM AL BAROKAH	P9908871	B
16	CIKEUSAL	PKBM AL- MA'ARIF	P9999036	Belum
17	CIKEUSAL	PKBM AN NADHIF	P9908661	B
18	CINANGKA	PKBM BINA BANGSA	P9926354	C
19	CINANGKA	PKBM NURANI WARGA	P9926353	C
20	CINANGKA	PKBM KAMPUNG QURAN BONGBAK	P9998659	Belum
21	CINANGKA	PKBM PELITA BULAKAN	P2970110	A
22	CIOMAS	PKBM NUANSA ALAM	P9962885	C
23	CIOMAS	PKBM NUR ILLAHI	P9908895	C
24	CIOMAS	PKBM CAHAYA ILMU	P9997233	C
25	CIOMAS	PKBM NUR ASSIDQI BANTEN	P9997760	C
26	CIOMAS	PKBM SUMBERDAYA	P9908896	B
27	CIRUAS	PKBM NURUL KHOIR	P9926494	C

28	CIRUAS	PKBM TUNAS HARAPAN BANGSA	P9952810	C
29	CIRUAS	PKBM AMALUNA	P9999151	Belum
30	CIRUAS	PKBM AL MISBACH	P2970111	B
31	GUNUNGSARI	PKBM AL WASIDIYAH	P9952529	C
32	GUNUNGSARI	PKBM INSAN MULIA	P9952459	C
33	GUNUNGSARI	PKBM BINA TARUNA SUKALABA	P9997199	B
34	GUNUNGSARI	PKBM MAJU MANDIRI	P9926463	C
35	GUNUNGSARI	PKBM KARYA ANAK BANGSA	P9998084	C
36	JAWILAN	PKBM DAAR EL HASANAH	P9997122	C
37	KIBIN	PKBM GAPURA CENDIKIA	P9952779	C
38	KIBIN	PKBM AULIA BILQIS	P9998454	B
39	KIBIN	PKBM SATRIA MUDA	P9959849	C
40	KOPO	PKBM BAKTI WARGA	P9952777	B
41	KOPO	PKBM SEKAR	P9926493	B
42	KRAGILAN	PKBM ASHABUL KAHFI	P9959859	B
43	KRAGILAN	PKBM SRI MAKMUR	P9954168	C
44	KRAGILAN	PKBM MARIFATUL MUFIDATUS SOLIHIN	P9985062	B
45	KRAGILAN	PKBM ASY SYUKRIYAH	P2970222	C
46	KRAGILAN	PKBM ASSHIFATY	P9998065	Belum
47	KRAGILAN	PKBM HIDAYAT FARHATUL JANNAH	-	Belum
48	KRAMATWATU	PKBM AL-FIRDAUS	P9908874	B
49	KRAMATWATU	PKBM SIMBA		Belum
50	LEBAK WANGI	PKBM INSAN BANTEN MADANI	P9997123	C
51	LEBAK WANGI	PKBM PUYUH KONENG	P9997024	B
52	LEBAK WANGI	PKBM BINA NUSANTARA	P9998869	Belum
53	MANCAK	PKBM WAHANA LESTARI	P2970224	B
54	MANCAK	PKBM HARAPAN BARU	P2970223	B
55	PABUARAN	PKBM MIFTAHUL HUDA	P9908662	B
56	PABUARAN	PKBM UMMUL QURRO	P9985081	B
57	PABUARAN	PKBM AL FATIH	-	C
58	PADARINCANG	PKBM PRESTASI UNGGUL	P9996667	B
59	PADARINCANG	PKBM BINA WARGA	P9908663	A
60	PADARINCANG	PKBM LIBERTY	P9997488	B
61	PADARINCANG	PKBM SINAR PURNAMA	P9998046	B
62	PADARINCANG	PKBM ABASIYAH ALBY MAALY	P9999366	Belum
63	PAMARAYAN	PKBM AN NASHIRIYAH	P9952780	C
64	PAMARAYAN	PKBM PRATIWI	P9996705	B
65	PETIR	PKBM AN NISA	-	C
66	PETIR	PKBM AL FAUZAN	P9998067	Belum
67	PONTANG	PKBM SATU BANGSA	P2970257	B
68	PONTANG	PKBM SHOFFUL ISLAM	P9997027	Belum
69	PULOAMPEL	PKBM EMAS PULO	P9997045	Belum
70	TANARA	PKBM AL FAJAR	P9926486	C
71	TANARA	PKBM MANBAUL ITTIHAD	P2970108	C
72	TIRTAYASA	PKBM BINA WARGA	P9954225	C
73	TIRTAYASA	PKBM ALBAB FOUNDATION	P2970225	C
74	TIRTAYASA	PKBM MANDIRI BERSAMA	P9998142	C

75	TIRTAYASA	PKBM BANGUN BANGSA		Belum
76	TIRTAYASA	PKBM ASSALAM	P9997623	C
77	TIRTAYASA	PKBM AN NIDZOMIYAH	P9997815	Belum
78	TUNJUNG TEJA	PKBM AMANAH	P9908664	B
79	TUNJUNG TEJA	PKBM MAHARANI	P2970226	C
80	TUNJUNG TEJA	PKBM PENCERAH ANAK BANGSA	P9997796	Belum
81	TUNJUNG TEJA	PKBM CAHAYA HATI	P9926387	C
82	WARINGIN KURUNG	PKBM AL IRSYAD	P9908899	B
83	WARINGIN KURUNG	PKBM PELANGI DESA	P2970253	C
84	WARINGIN KURUNG	PKBM PENALILMU	P9984836	C

*Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten*

*Serang, 2024.*

Berdasarkan table 1.5 di atas diketahui dari 84 PKBM terdapat 16 PKBM yang belum terakreditasi, sementara yang mendapatkan akreditasi C sebanyak 36 PKBM. Hal ini tentunya mengganggu penyelenggaraan program Pendidikan kesetaraan yang ada di Kabupaten Serang.

- c) Keberadaan lembaga Pendidikan non-formal/PKBM belum merata di pelosok desa di seluruh wilayah Kabupaten Serang, data pada tabel 1.3 sehingga keterjangkauan terhadap akses Pendidikan disuatu daerah menjadi kurang maksimal. Diketahui berdasarkan data tersebut terdapat 84 PKBM sebagaimana data yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang yang tersebar di 26 Kecamatan.
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan masih rendah, kesadaran untuk mengakses pendidikan menjadi faktor penting yang ada di dalam diri seseorang, kesadaran ini akan mendorong minat seseorang untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diketahui bahwa minat untuk mengakses Pendidikan yang lebih tinggi melalui program pendidikan kesetaraan di Kabupaten Serang cukup baik

meskipun terdapat 8 PKBM yang tidak ada peminat sama sekali, ini menunjukkan bahwa motivasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam mengenyam Pendidikan kesetaraan melalui PKBM. Data dukungan lain terkait masih rendahnya kesadaran terhadap Pendidikan bahwa masih tingginya angka putus PKBM yang ada di Kabupaten Serang yaitu terdapat 122 siswa yang putus PKBM dari berbagai PKBM yang ada di Kabupaten Serang. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa tingkat kesadaran yang masih rendah dalam mengakses Pendidikan guna memperbaiki masa depan yang akan datang.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Serang Tahun 2024.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas mengenai Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Serang, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- 1) Masih Kurangnya prasarana sarana PKBM baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- 2) Masih banyaknya jumlah PKBM yang belum terakreditasi dan terakreditasi C pada tahun 2024.
- 3) Keberadaan lembaga Pendidikan non-formal/PKBM belum merata.

- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah-masalah di atas mengenai Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Serang, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penyelenggaraan program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada pendidikan kesetaraan di Kabupaten Serang?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada pendidikan kesetaraan di Kabupaten Serang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian mengenai Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Serang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara praktis dapat berkontribusi untuk pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam memperbaiki Implementasi Program Kesetaraan,

Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada Pendidikan Kesetaraan guna dapat lebih meningkatkan kesetaraan pendidikan di masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

2. Secara akademik, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan diskusi bagi kalangan akademisi dan praktisi yang berkecimpung dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aan Komariah and Djaman Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2019. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer (Cetakan kesembilan)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. Sage Publications, Inc.
- Fuad Anis & Kandung S. Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Indiahono, Diyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Islamy, M Irfan. 2012. *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Moleong J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda karya.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan*. Jakarta : Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sarfa, W. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kampung Warga Negeri Hative Kecil Kota Ambon*. *Al-Iltizam*, 1(2), 93–113.

- Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media.

### **Jurnal :**

- Septianto, H. (2021). *Pemetaan Anak Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020*. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 10(4), 1–11. <https://doi.org/10.21831/sakp.v10i4.17478>.
- Tamba, E. M., Krisnani, H., & Gutama, A. S. (2014). *Pelayanan Sosial Bagi Remaja Putus Sekolah*. *Share: Social Work Journal*, 4(2),1–6. <https://doi.org/10.24198/share.v4i2.13077>.
- Zainuri, M., Matsum, J. H., & Thomas, Y. (2020). *Tingkat Pendapatan, Sosial, Budaya dan Jarak Rumah dengan Sekolah sebagai Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di SMP*. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 3(10), 1–15.
- Ziana, U., Aminuyati, A., & Khosmas, F. Y. (2017). *Analisis Faktor Ekonomi Penyebab Anak Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah di Desa Teluk Kembang*. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 1(1), 1–9.

### **Dokumen Peraturan**

- Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

### **Dokumen Lainnya**

- Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, 2024.
- Data Pokok Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, 2024.

Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2023